

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Diantara ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di muka bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat. Ada dua dimensi dalam memahami hukum Islam, *pertama* hukum Islam berdimensi Illahiyah, dalam arti hukum Islam dipahami sebagai syariat yang cakupannya begitu luas, mencakup bidang keyakinan, amaliyah dan akhlaq. *Kedua*, hukum Islam yang berdimensi Insaniyah, hukum Islam dipahami sebagai upaya manusia untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan pendekatan yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan Maqhasid. Dalam dimensi ini hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan ijtihad.¹

Kitab suci Al-Qur'an dijadikan muara dalam hukum Islam, Al-Qur'an dijadikan sebagai ide dasar dan nilai-nilai bagi pembentukan masyarakat. Setiap bangsa punya norma-norma tentang hal-hal yang diperintahkan dan yang dilarang baik dalam kaitannya dengan dirinya sendiri sehingga dia memerintahkan dan melarang dirinya itu, atau dalam kaitannya dengan orang lain. Larangan dan Perintah

¹ *Jaih Mubarak Sejarah Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1997) h. viii

yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an menuntut setiap individu untuk menyerukan kebaikan dan mencegah yang munkar, sebagaimana Allah berfirman

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْبِرِّ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada diantara kamu suatu umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar dan mereka itulah orang-orang yang beruntung” (Q S Ali Imran : 104)²

Seruan mengenai perintah Amar bil Ma'ruf wa Nahyi'an al-Munkar kemudian disingkat **AMNM**, menurut terminologi bahasa Arab ma'ruf diambil dari kata ma'rifah yang berarti segala sesuatu yang diketahui oleh hati dan jiwa tentram kepada-Nya dan secara syar'ie ma'ruf berarti segala sesuatu yang dicintai Allah SWT, seperti taat kepada-Nya dan berbuat baik kepada hamba-hamba-Nya, sedangkan munkar berarti sesuatu yang diingkari jiwa, tidak disukai dan tidak dikenalnya. Menurut syar'ie berarti sesuatu yang dikenal keburukannya secara syar'i dan akal³

Amar bil Ma'ruf wa Nahyi 'an al-Munkar (AMNM) merupakan kewajiban bagi setiap individu. Setiap individu dituntut kesadarannya melakukan AMNM. Kesadaran dari setiap individu-individu itu agar dapat terarah dan terlaksana dengan baik. Haruslah dilaksanakan secara kolektif. Kesadaran kolektif tersebut dalam konsep kenegaraan direalisasikan dalam bentuk kelembagaan yang kemudian menjadi

² Soenardjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: DEPAG, 1998), h. 93

³ Salman Al Audah, Fadli Illahi, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993) h. 11

sebuah institusi-institusi yang dianggap memiliki kewenangan tersendiri dan bersifat independent. Selain itu bagian dari lembaga tersebut membentuk suatu organisasi-organisasi yang mengacu kepada kepentingan masyarakat.

Berbagai organisasi tersebut yang selanjutnya disebut sebagai organisasi masyarakat (Ormas) memiliki visi dan misi organisasi, visi dan misi organisasi sifatnya sangat beragam tergantung pada landasan yang dipakai pada sebuah organisasi. Misalnya organisasi masyarakat Islam (Ormas-I) mengacu kepada landasan organisasinya yaitu Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan Ormas yang nasionalis mengacu kepada landasan organisasi yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Dalam menjalankan berbagai program kerjanya, masing-masing Ormas mempunyai tujuan tersendiri sesuai dengan misi organisasi, misalnya Ormas-Islam Gerakan Pemuda Islam disingkat GPI, sesuai dengan anggaran dasar rumah tangganya dan khittah perjuangan organisasi dalam setiap kegiatannya bertujuan untuk melaksanakan AMNM. Menurut GPI AMNM dapat direalisasikan dalam berbagai sektor kehidupan tanpa terkecuali, namun AMNM menuntut para pelaksananya agar komitmen dan memahami prinsip-prinsip dasarnya agar apa yang dicita-citakan dapat dicapai seutuhnya sesuai ajaran Syariah.

GPI dalam melaksanakan AMNM sangat terkesan hati-hati sekali dan sangat komitmen. Kehati-hatian GPI tersebut disebabkan oleh berbagai faktor penunjang dan faktor penghambatnya di masyarakat.

Faktor penunjang dan penghambat tersebut kemudian di kodifikasi ulang oleh GPI agar tujuan AMNM berjalan tanpa harus menimbulkan masalah baru, melainkan menyelesaikan masalah yang ada

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan GPI di wilayah DKI Jakarta menimbulkan dampak yang positif bag. masyarakat setempat dan wilayah Jakarta pada umumnya, meskipun tidak terlalu dirasakan secara langsung oleh masyarakat, namun kegiatan GPI dinilai berbagai kalangan lebih bersifat hati-hati dalam melaksanakan AMNM di Jakarta, karena situasi serta kondisi dan antusias masyarakat itu sendiri dalam keikutsertaannya melaksanakan AMNM. Namun tidak hanya itu, Jakarta sebagai Ibukota Negara, terdiri dari beragam anggota masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini semakin menuntut GPI untuk lebih memperbaiki segala kegiatannya dalam melaksanakan AMNM. Berbeda dengan Ormas Islam lainnya seperti Front Pembela Islam (FPI) yang terkesan gencar menyerukan AMNM di Jakarta, bahkan dengan aksi-aksi FPI yang dinilai kontroversial di masyarakat GPI beranggapan menyerukan kebenaran tidak harus dengan cara yang tidak benar banyak langkah yang lebih baik untuk mencapai kebenaran dan terlaksananya AMNM di Jakarta khususnya dan umumnya bagi seluruh umat di dunia.

Metode yang diterapkan GPI dalam melaksanakan AMNM di Jakarta sebenarnya sangat berbeda dengan metode yang diterapkan FPI dalam aksinya, karena GPI berlandaskan pada firman Allah SWT dalam Q S An-Nahl 125 :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ يَاتِي هِيَ أَحْسَنُ
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّى عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk"
 (Q S An-Nahl : 125)⁴

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan gambaran umum di atas, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya Gerakan Pemuda Islam serta bagaimana gambaran umum program-program politik Gerakan Pemuda Islam?
2. Bagaimana pelaksanaan politik praktis Gerakan Pemuda Islam di Daerah Khusus Ibukota Jakarta?
3. Bagaimana implikasi politik praktis Gerakan Pemuda Islam di Daerah Khusus Ibukota Jakarta?
4. Bagaimana peran politik Gerakan Pemuda Islam dalam perspektif siyasah Dusturiyah?

⁴ Soenardjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: DEPAG, 1998) h. 421

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- 1 Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi berdirinya Gerakan Pemuda Islam (GPI) serta bagaimana gambaran umum program-program politik GPI
- 2 Untuk mengetahui pelaksanaan politik praktis GPI di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 3 Untuk mengetahui Implikasi politik praktis GPI di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 4 Untuk mengetahui bagaimana peran politik GPI dalam perspektif siyasah Dusturiyah

D. Kerangka Pemikiran

Perilaku politik umat Islam secara keilmuan dituntun oleh *fiqh siyasah*, yakni sebuah ilmu yang membahas tentang politik, baik politik ekonomi, sosial, maupun dalam konteks bernegara atau pemerintahan. Sementara itu, pengertian A. Djazuli, politik merupakan upaya mengurus kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan umat sesuai dengan tuntunan syara'. Karena itu, siyasah adalah

تَدْبِيرُ مَصَالِحِ الْعِبَادِ عَلَى وَقْفِ الشَّرْعِ

Pengurusan kemaslahatan manusia sesuai dengan syara'.⁵

⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Gunung Djati Pres, 2000) h. 24

Konsep yang tegas tentang tujuan syariat demi kemaslahatan itu adalah *maqashid al-syari'ah* yang terdiri dari atas lima hal, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara akal, (3) memelihara jiwa, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta kekayaan. Lima tujuan ini dibangun oleh tiga kebutuhan manusia yang bersifat *dharuriah* (primer), *hajjiah* (tertier) dan *tahsimyah* (komplementer)⁶

Konteks utama dalam pemeliharaan tersebut apabila dikaitkan dengan siyasah dusturiyah adalah siyasah yang menyangkut rakyat, negara dan pemerintah serta berbagai mekanisme berbangsa dan bernegara, adalah upaya perlindungan terhadap hak-hak masing-masing individu memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak yang paling fundamental bagi umat manusia adalah hak asasi yang menurut Abdul Qadir Audah meliputi empat hal, yaitu

- (1) Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya,
- (2) Perlindungan terhadap kebebasan pribadi,
- (3) Kebebasan menyatakan pendapat dan keyakinan, serta
- (4) Terjamin kebutuhan pokok hidupnya dengan tidak membedakan kelas kepercayaan⁷

Empat hal di atas, bagi Abdul Qadir Audah, adalah hak persamaan dan hak kebebasan berpikir, beraqidah, berbicara, berpendidikan, dan hak memiliki. Setiap hal itu dilengkapi oleh kewajiban bagi negara, rakyat, dan pemerintah, serta kebebasan berpendapat dibangun atas dasar etika yang benar menurut hukum

Siyasah dusturiyah, menurut Al-Mawardi, membicarakan tujuh inti dari pembahasannya, yakni berkaitan dengan hal-hal berikut (1) persoalan rakyat, status

⁶ *Ibid* h 52

⁷ *Ibid* h 59

dan hak-haknya, (2) *imamah*, hak dan kewajibannya, (3) *waliyul ahdi*, (4) *bai'ah*, (5) perwakilan, (6) *wizarah* dan perbandingannya, serta (7) *ahl al-hal wa al-'aqd*

Dalam merealisasikan perilaku politik di atas ditentukan oleh prinsip-prinsip dasar siyasah disturiyah, yakni (1) prinsip ketauhidan, (2) prinsip kemanusiaan, (3) prinsip keadilan, (4) prinsip persamaan, (5) prinsip pengawasan, (6) prinsip tanggung jawab bersama, dan (7) prinsip tolong menolong

Prinsip-prinsip di atas didasarkan kepada dalil-dalil yang diambil dari Al-Qur'an, Hadits dan produk ijtihad Dalil-dalil *ijtihadiah* yang dijadikan sandaran berujung pada kaidah sebagai berikut

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan*⁸

Salah satu upaya untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut adalah dengan pendekatan politik dakwah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-Nahl/16 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk" (Q S An-Nahl : 125)⁹

⁸ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 61

⁹ RHA Soenarjo dkk. *loc cit*

Cara mengajak yang baik dan benar ditunjukkan Nabi SAW melalui hadits sebagai berikut

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ
وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

Barangsiapa diantara kalian melihat kemunkaran hendaklah mengubah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu maka hendaklah dengan hatinya itulah selmah-lemahnya iman¹⁰

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh untuk mendapatkan data dan fakta dalam penelitian ini adalah

1. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah **metode deskriptif** yaitu dengan cara mendeskripsikan peristiwa dan masalah yang diteliti secara sistematis logis dan kritis serta memberikan analisis terhadap masalah yang berkembang di lahan penelitian¹¹

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini DKI Jakarta adalah lokasi yang dipilih berdasarkan pertimbangan lokasi tersebut adalah sentral kegiatan GPI (Gerakan Pemuda Islam)

¹⁰ Diriwayatkan oleh Muslim No. 78 (49) *Kitab Al-Iman, Bab Penjelasan bahwa "mencegah kemunkaran adalah sebagian dari iman ..."*

¹¹ Sumardi Suryabrata *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 18

3. *Sumber Data*

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas

- a Sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh dari kesekretariatan (Pimpinan Pusat GPI) di Jakarta
- b Sumber data sekunder yaitu data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti majalah, koran, bulletin dan buku-buku lain serta informasi Internet

4. *Teknik Pengumpulan Data*

Dalam memperoleh data-data yang diperlukan maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas

- 1 Observasi, yaitu studi yang di sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan
- 2 Interview, yaitu percakapan dengan tatap muka dengan tujuan memperoleh informasi yang faktual untuk menafsir dan menilai keterangan dari *key informan* (informasi kunci) seperti dari civitas GPI, Ormas-ormas, ataupun dari Pemda setempat bagian Sospol (sosial politik) yang kompeten
- 3 Studi pustaka yaitu mempelajari segala hal yang berkaitan dengan syasah dusturiyah atau informasi lain dari buku-buku, dan literatur lain yang membantu

5. *Analisis Data*

- a Mengklasifikasi data sesuai dengan tujuan penelitian.
- b Menafsirkan data yang sudah diklasifikasi dengan menggunakan metode content analisis (analisis isi) berdasarkan kerangka pemikiran.
- c Menarik kesimpulan sesuai dengan maksud pembahasan serta tujuan penelitian

